

TAHUN 2001, JAKARTA BEBAS BENSIN BERTIMBEL

1) PENDAHULUAN

Tak ada lagi kolong yang aman untuk penduduk Jakarta. Setiap saat petaka mengintip. Penyebabnya tiada lain adalah sekitar 3,5 juta knalpot kendaraan bermotor yang setiap harinya memacetkan jalanan di Jakarta. Lebih parah lagi, 63% kendaraan yang beroperasi itu termasuk jenis 'penebar maut', yang knalpotnya membuang 600 ton polutan timbal per tahun. Kelompok masyarakat yang paling rentan, tentu saja para pekerja informal yang setiap harinya mengais penghidupan di jalanan. Sebut saja tukang asong, pedagang kaki lima, pengamen, pengemudi bajaj, bus kota, mikrolet dan metro mini. Kelompok masyarakat inilah yang setiap harinya "bercumbu rayu" dengan zat-zat maut yang disemprotkan kendaraan yang lalu lalang di sekitarnya.

Timbal adalah neurotoksin – racun penyerang syaraf – yang bersifat akumulatif dan dapat merusak pertumbuhan otak pada anak-anak. Studi mengungkapkan bahwa dampak timbal sangat berbahaya pada anak-anak karena berpotensi menurunkan tingkat kecerdasan (IQ). Selain itu, timbal (Pb) sebagai salah satu komponen polutan udara mempunyai efek toksik yang luas pada manusia dan hewan dengan mengganggu fungsi ginjal, saluran pencernaan, sistem saraf pada remaja, menurunkan fertilitas, menurunkan jumlah spermatozoa dan meningkatkan spermatozoa abnormal serta aborsi spontan.

Beban Sosial

Menurut laporan Bank Dunia 1992, diketahui bahwa pencemaran udara akibat timbal, menimbulkan 350 kasus penyakit jantung koroner, 62.000 kasus hipertensi dan menurunkan IQ hingga 300.000 point. Juga Pb menurunkan kemampuan darah untuk mengikat oksigen. Keadaan ini menyebabkan meningkatnya biaya sosial berupa biaya kesehatan yang menurut estimasi World Bank (1993) mencapai US\$ 62 million (1990) dan US\$ 222 Million (2008). Estimasi dengan menggunakan metoda yang sama yaitu yang diindikasikan oleh Bapedal mencapai US\$ 600 Million untuk 5 tahun (1996-2000).

Timbal masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan (85%) , pencernaan (14 %), kulit (1%), setelah seseorang tersebut berada dalam udara yang tercemar timbal. Setiap paparan udara yang tercemar timbal sebesar $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ berpeluang menyumbangkan 2.5 – 5.3 $\mu\text{g}/\text{dl}$ timbal pada darah seseorang yang berada di tempat tersebut. Sementara hasil pemantauan kadar timbal di udara untuk daerah pemukiman di Jakarta selama kurun waktu 1994-1998 menunjukkan kisaran 0,2 – 1,8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Ini berarti keadaan udara di Jakarta sudah pada tingkat yang cukup membahayakan, mengingat telah melampaui angka di atas, lagi pula perkembangan terakhir menyebutkan bahwa tidak ada ambang batas bagi pencemaran timbal karena sifatnya yang akumulatif. Ketika akumulasi timbal dalam darah seorang anak mencapai 10 $\mu\text{g}/\text{dl}$ maka dapat terjadi penurunan IQ sebesar kurang lebih 2.5 point. Apabila hal tersebut terjadi pada orang dewasa, maka efek yang timbul adalah gejala berbagai sakit dan penyakit sebagaimana di sebutkan di atas.

Meningkatnya penderita sakit/penyakit di kalangan masyarakat akan membawa dampak menurunnya produktifitas kerja di satu sisi dan meningkatnya pengeluaran untuk tujuan biaya pengobatan di sisi lain. Menurunnya produktivitas kerja ini akan mendorong menurunnya tabungan masyarakat sementara meningkatnya biaya pengobatan yang berarti meningkatnya pengeluaran rumah tangga menyebabkan berkurangnya potensi konsumsi atas barang/jasa lain. Kondisi menurunnya tabungan dan semakin berkurangnya variasi pola konsumsi atas barang/jasa ini merupakan cerminan penurunan derajat kesejahteraan masyarakat. Secara makro ekonomi ini merupakan penurunan pertumbuhan ekonomi nasional.

2) **PERKEMBANGAN PENGHAPUSAN BENSIN BERTIMBEL**

1. **TAHUN 2001, JAKARTA BEBAS BENSIN BERTIMBEL**

Setelah mengalami proses pasang surut, upaya penghapusan bensin bertimbel mencapai kesepakatan mengenai jadwal. Yaitu per 1 Juli 2001 Pertamina mulai memasok bensin tanpa timbel untuk Jakarta. Kesepakatan ini lahir atas proposal yang disampaikan dalam presentasi Bapak Asyhab, Deputy Direktur Hilir (Bidang Pengolahan) pada pertemuan yang diselenggarakan oleh DKPP (Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina) dengan mengundang KPBB (Komite Penghapusan Bensin Bertimbel) pada hari Jumat, 12 Januari 2001 di Sekretariat DKPP Jalan Perwira 6 Jakarta Pusat. Pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan dari pertemuan sebelumnya yaitu pada tanggal 14 Desember 2000. Kedua pertemuan ini merupakan prakarsa Bapak DR Purnomo Yusgiantoro, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI. Hadir pada pertemuan ini antara lain Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Migas, BAPEDAL, Pertamina, BAPPENAS, BAPEDAL, Walhi, ICEL, Lemkoha, Program Segar Jakartaku, LPOM Departemen Kesehatan, GAIKINDO, PASMI dan IATO.

2. **PERTEMUAN DKPP**

Setelah melalui proses presentasi oleh KPBB dan diskusi, *pertemuan pertama* yang dipimpin oleh Sekretaris DKPP, Bapak Ir Iin Arifin Takhyan tersebut menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

- a. Perlunya penetapan spesifikasi bahan bakar (bensin):
 - i. Spesifikasi untuk jangka pendek (Juni 2001). Spesifikasi ini diperuntukkan sebagai kebijakan transisi menuju selesai dibangunnya kilang yang menghasilkan bensin tanpa timbel. Secara teknis ini dapat ditempuh dengan penggunaan oxygenate (ethanol, ETBE, MTBE) atau additive non timbel (MMT dll) untuk meningkatkan angka octane.
 - ii. Spesifikasi untuk jangka panjang (1 Januari 2003). Secara teknis ini ditempuh dengan pembangunan catalytic reformer dan isomerisasi yang menghasilkan HOMC; bahan baku bensin tanpa timbel. Proses pembangunan itu sendiri butuh biaya sekitar US\$190 juta hingga US\$ 230 juta.
- b. Perlunya mengintegrasikan kebijakan bensin tanpa timbel ke dalam kebijakan harga sehingga diperoleh harga yang realistis dan memberikan insentif terhadap penggunaan energi bersih termasuk bensin tanpa timbel.

Kedua point kesepakatan tersebut ditindaklanjuti oleh Pertamina dan Direktorat Jenderal MIGAS ke dalam perhitungan **teknis spesifikasi bensin** dan **implikasinya** terhadap harga, sehingga ke depan dapat dipertimbangkan oleh DKPP dan

Pemerintah dalam menetapkan kebijakan bensin tanpa timbel dan kebijakan harga ke dalam satu kesatuan yang terintegrasi.

Pertemuan kedua dipimpin oleh Sekretaris DKPP yang baru yaitu Bapak Roes Aryawijaya. Berdasarkan perhitungan yang dibuat oleh Pertamina dan MIGAS – sebagaimana kesepakatan tanggal 14 Desember 2000 – secara rasional Pertamina mampu memasok bensin tanpa timbel untuk Jakarta per 1 Juli 2001. Memang kenyataannya, penerapan bensin tanpa timbel untuk Jakarta ini berimplikasi terhadap harga di mana terdapat biaya tambahan berkisar antara Rp 71,51 sampai dengan Rp 120,98 per liter (alternatif tidak menggunakan *octane booster*) atau antara Rp 55,35 sampai dengan Rp 93 per liter (alternatif menggunakan *octane booster*). Sementara menurut perhitungan KPBB, biaya tambahan berkisar antara Rp 113 sampai dengan Rp 150 per liter (alternatif tidak menggunakan *octane booster*) atau Rp 160 per liter (alternatif menggunakan *octane booster*).

3. KOMITMEN NASIONAL

Komitment nasional untuk menerapkan kebijakan penghapusan bensin bertimbel sebagaimana hasil Lokakarya pada 28 – 29 Februari 2000 menyebutkan bahwa Jabotabek akan bebas bensin bertimbel pada tahun 2001 sementara secara nasional tahun 2003. Ini sejalan dengan SK Mentamben RI Nomor 1585K/32/MPE/1999 mengenai spesifikasi bahan bakar – *di mana di antaranya disebutkan bahwa per 1 Januari 2003 bensin di Indonesia harus sudah bebas timbel* –.

Meski telah ada komitment nasional, upaya advokasi tidak berhenti di sini. Upaya **menggalang dukungan** dengan **memanfaatkan segala peluang** senantiasa dilakukan. Hal ini mengingat pengalaman bahwa sekali pun kala itu – 29 Oktober 1996 – Presiden Soeharto telah mencanangkan bahwa tahun 1999 Indonesia akan bebas timbel atau sekali pun telah ada komitment dengan IMF bahwa Indonesia akan bebas timbel per Desember 1999 dan bahkan perencanaan Pertamina dalam rangka Program Langit Biru – lihat table –, tetapi hal itu tetap saja sesuatu yang sulit untuk direalisasikan.

Upaya menggalang dukungan ini **tidak saja** dilakukan secara nasional melalui berbagai stakeholder dan masyarakat di dalam negeri, tetapi juga dilakukan dengan **meminta dukungan internasional**, baik dari individu, NGO, *private sector* maupun pemerintah negara sahabat. Dukungan internasional ini terakumulasi pada saat diselenggarakannya **International Conference on Sustainable Transportation and Clean Air** di Hotel Sahid – Jakarta pada tanggal 29 – 31 Mei 2000.

POLA KEBIJAKAN DALAM MENOPANG PROGRAM LANGIT BIRU

POLA I

| NO | TAHUN | KANDUNGAN (CC/USG) | TEL |
|----|-------------|-----------------------|-----|
| 1 | 1999 – 2000 | 0.5 | |
| 2 | 2000 – 2001 | 0.0 | |

POLA II

| NO | TAHUN | KANDUNGAN (CC/USG) | TEL |
|----|--|-----------------------|-----|
| 1 | 1999 - 2000 Pulau Jawa Luar Pulau Jawa | 0.0 0.5 | |
| 2 | 2000 – 2001 | 0.0 | |

Sumber: Pertamina, 1998

4. MENGAPA JAKARTA DIPRIORITASKAN?

Kebijakan bensin tanpa timbel akan efektif dalam menurunkan resiko pencemaran udara, khususnya yang diakibatkan oleh timbel (Pb) apabila diterapkan di kawasan padat kendaraan seperti Jakarta, dengan alasan sebagai berikut:

- a. **Pertama**, terkait dengan populasi lalu lintas yang mencapai 4 juta unit dan tingkat konsumsi bensin mencapai 30% dari permintaan nasional – *permintaan nasional sebesar 12.338.513 KL per tahun* – yang berarti sekitar 4 juta KL per tahunnya; telah menyebabkan udara tercemar timbel hingga 0,2-1,8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Seperti diketahui, nilai ambang batas yang ditetapkan WHO adalah 0,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ bahkan belakangan tidak ada nilai ambang yang aman untuk pencemaran timbel karena sebagai logam berat, timbel bersifat akumulatif ketika telah masuk ke dalam tubuh. Di sisi lain, Jabotabek adalah kawasan yang paling siap untuk penerapan teknologi dalam upaya meningkatkan kualitas udara. Dan upaya ini tidak dapat dimulai bila bensin masih mengandung timbel.
- b. **Kedua**, Jabotabek adalah langkah awal guna memulai penerapan bensin tanpa timbel secara nasional. Informasi dari pakar menyebutkan bahwa apabila tidak dimulai dari Jakarta pada tahun 2001, maka secara teknis tahun 2003 secara nasional akan gagal. Telah ada indikasi kegagalan ini, antara lain belum adanya kejelasan aktivitas non teknis rencana pembangunan *catalytic reformer* dan isomerisasi seperti proses seleksi *license agreement*, pencarian dana (*financing*) dan *loan agreement*, proses tender serta *contract agreement* yang diprediksi memerlukan waktu 8 bulan. Ini berarti target 1 Januari 2003 Indonesia bebas bensin timbel akan gagal mengingat proses aktivitas teknis konstruksi pembangunan kilang yang mampu menghasilkan HOMC ini -- *bahan baku bensin tanpa timbel* -- memerlukan waktu 24 bulan.
- c. **Ketiga**, tidak ada masalah dengan kendaraan tua yang dimatikan akan mengalami kerusakan pada dudukan katup apabila menggunakan bensin tanpa timbel. Sebagaimana informasi dari Gaikindo, hal itu hanya terjadi pada kondisi tes di laboratorium di mana kendaraan dipacu dengan kecepatan 100 km perjam selama 1 jam terus menerus. Kondisi itu pun masih dapat diatasi dengan mengganti dudukan katup dari logam keras.
- d. **Keempat**, Jakarta sebagai wilayah terbuka bagi seluruh kendaraan – yang akan keluar-masuk Jakarta – bukanlah sebuah permasalahan, mengingat kendaraan berbahan bakar bensin dapat diisi dan beroperasi dengan bensin tanpa timbel sehingga kendaraan yang biasa diisi oleh bensin bertimbel pun tidak akan bermasalah apabila diisi oleh bensin tanpa timbel. Dan untuk ini, tidak perlu mengontrol kendaraan yang keluar masuk Jakarta, tetapi cukup memantau pelaksanaan kebijakan distribusi bensin tanpa timbel di Jabotabek dapat berjalan baik.

- e. **Kelima**, alasan kendala investasi untuk menerapkan spesifikasi jangka pendek (Juni 2001) di atas adalah tidak benar karena spesifikasi jangka pendek sebagai kebijakan transisi dapat diterapkan tanpa biaya investasi; baik untuk pengadaan bensin tanpa timbel maupun teknologi kendaraan. Pada masa transisi, kendaraan tidak diharuskan memasang *catalytic converter* sehingga tidak membebani pengguna kendaraan.
- f. **Keenam**, pengertian penghapusan bensin bertimbel tidak berarti menghapusnya 100%, tetapi lebih memberikan pilihan kepada konsumen untuk menggunakan bensin (premium) tanpa timbel melalui penyediaan bensin tanpa timbel secara memadai dengan memberikan insentif harga yang lebih murah ketimbang bensin bertimbel.
- g. **Ketujuh**, produksi kilang Balongan mampu men-*supply* kebutuhan bensin tanpa timbel untuk Jabotabek dengan ketentuan menggunakan spesifikasi jangka pendek seperti dijelaskan di depan.

5. **TARGET AKSI BERIKUT**

- a. Mendorong diterbitkannya peraturan perundangan yang menunjang penghapusan bensin bertimbel:
 - i. Ketetapan atas spesifikasi bensin tanpa timbel sesuai dengan perhitungan yang telah dibuat oleh Pertamina dan MIGAS sebagai tersebut di atas dan ketetapan standar emisi kendaraan yang mengacu pada ketetapan spesifikasi bahan bakar.
 - ii. Peraturan yang mengikat semua pihak dalam upaya mewujudkan penghapusan bensin bertimbel pada Juli 2001 untuk Jakarta dan Januari 2003 untuk Indonesia.
- b. Mendorong koordinasi lintas sektoral:
 - i. Pembahasan dan mencari solusi atas implikasi biaya yang terjadi untuk penerapan bensin tanpa timbel.
 - ii. Pembahasan sosialisasi rencana penghapusan bensin bertimbel kepada masyarakat.
- c. Menggali sumber informasi guna memberikan masukan bagi pemerintah untuk mempercepat penerapan kebijakan energi bersih – bensin tanpa timbel – termasuk test darah untuk mengetahui tingkat pencemaran timbel dalam darah (*blood lead level*).
- d. Sosialisasi dan Pendidikan Masyarakat:
 - i. Sosialisasi mengenai penghapusan bensin bertimbel
 - ii. Pendidikan Masyarakat mengenai keuntungan dan manfaat penggunaan bensin tanpa timbel:
 - (1) Manfaat secara teknis bagi kendaraan termasuk menghilangkan kekhawatiran masyarakat mengenai mitos dampak penggunaan bensin tanpa timbal
 - (2) Manfaat bagi kesehatan dan lingkungan hidup
 - (3) Manfaat dalam menekan social cost pada tataran ekonomi makro.

Tentu upaya ini perlu sinergi yang baik antar stakeholder mengingat pemerintah telah beketetapan untuk menetapkan kebijakan bensin tanpa timbel.

KPBB,

Jakarta, 22 Maret 2001